

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Arifin, Zaenal. *Metode Penulisan Ilmiah*. Cetakan ke-2. (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2011).
- Ashiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2007).
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- \_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007).
- \_\_\_\_\_. *Model-model Pengujian Konstitusionalitas di Berbagai Negara*. Cetakan ke-3. (Jakarta: Konstitusi Perss, 2006).
- \_\_\_\_\_. *Setahun Mahkamah Konstitusi: Refleksi Gagasan dan Penyelenggaraan serta Setangkep Harapan*, dalam Refly Harun, Zainal AM Husein dan Bisariyadi (editor), *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2004).
- Asshiddiqi, Jimly & Muchamad Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cetakan ke-9. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).
- Busroh, Daud. *Ilmu Negara*. Cetakan Ke-6. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
- Farida Indarti, Maria. *Ilmu PerUndang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi muatan)*. (Yogyakarta: Kanisius 2007).
- Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingrecht) yang dimiliki Hakim dalam System Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005).
- Friedrich, Carl J. *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. (Waltham: Blaisdell Publishing Company, 2001).

- Gautama, Sudargo. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1973).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987).
- Hamidi, Jazim. Dan Mustafa Lufti. *Lembaga Kepresidenan*. (Jakarta: Alumni, 2010).
- Huda, Ni'matul. *Politik Ketatanegaraan Indonesia*. Cetakan Pertama. (Yogyakarta: FH UII Press, 2003).
- Kansil, C.S.T., *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- \_\_\_\_\_. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. Edisi revisi. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007).
- Latif, Abdul. *et al. Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (Yogyakarta: Total Media, 2009).
- Luthfi, Mustafa. *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia* (Jogjakarta: UII Press, 2010).
- Mahmodin, Mahfud. *Dasar-Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Media Group, 2006).
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Media Group, 2008).
- R. Ridwan H. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007).
- Rasyid Thalib, Abdul . *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam sisitem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Bandung: Citra aditya Bakti, 2006).

- Riyanto, Astim. *Teori Konstitusi*. (Bandung: Penerbit Yapemdo, 2006).
- Siahaan, Maruarar. *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi yang Hidup*. (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2008).
- Soemantri, Sri. *Hak Menguji Materiil di Indonesia* (Bandunng: Alumni, 1997).
- Soeroso, R. *Praktek Hukum Acara Perdata; Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2001).
- Syahuri, Taufiqurrahman. *Hukum Konstitusi*, (Bogor: Gahlia Indonesia, 2004).
- Tim Penyusun. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Cetakan Pertama*. (Jakarta: Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).
- Tjandra, Riawan. *Hukum Sarana Pemerintahan*. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2014).

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 14)*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879)*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316)*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Undang-Undang ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5226)*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264).*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480).*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewajiban Menyimpan Uang dalam Bank.*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil.*

### **C. ARTIKEL DAN JURNAL**

Astomo, Putera. "Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi", Jurnal MK Volume 11 Nomor 3, (Jakarta September 2014).

Anwar. "Perppu dalam Sistem PerUndang-Undangan dan Pengujian oleh MK RI", Proposal. Didampaikan dalam Seminar Nasional Ketatanegaraan dan Musda Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur UMM, Malang 30 Oktober 2010.

Dwi Putri Cahyawati, "Menelaah Keberadaan Mahkamah Konstitusi: Pengaruh Gagasan Pembentukannya terhadap Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Volume 1 Nomor 5 (Juli, 2002).

Dwi Wedhaswary, Ingrid. "Isi Perppu yang Dikeluarkan Oleh Presiden SBY", *www.nasionalkompas.com*, 3 Oktober 2014.

Hadisoeparto. "Ilmu Hukum dan Pendekatannya". Proposal. Disampaikan pada Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Diskusi Panel tentang Refleksi Pendidikan Tinggi Hukum. (Semarang: 17 Januari, 2006).

Harsono, Yuli. "Polemik Penolakan Perpu JPSK". *www.hukumonline.com*, 19 Januari 2010.

Isra, Saldi. *Eksistensi Perppu dalam sistem PerUndang-Undangan*. (Jakarta: Pusat Studi Konstitusi, 2011).

Erdianto, Kristian. "Pembahasan RUU Pemilu dan Konflik Kepentingan Partai Politik", (On-line), tersedia di *www.nasionalkompas.com* (22 Juni 2017).

Mahkamah Konstitusi, "Sejarah Mahkamah Konstitusi" (On-line), tersedia di *www.mahkamahkonstitusi.go.id* (2 Mei, 2016).

Muda, Iskandar. "Pro-Kontra dan Prospektif Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu", *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, Vol 10 (Maret, 2003).

Imbawani, "Djoko. Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Media Hukum* Vol. 21 No. 1 Juni 2014.

Sina, Ibnu Chandranegara, "Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar Lembaga Negara: Kajian Atas Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009”. Proposal. Jurnal Yudisial, Volume 5 Nomor 1.

Soeroso, Fajar Laksono . “Pembentukan dan Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”. Proposal. Disampaikan pada Diskusi Pengkajian Perppu. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2012).

Yusmic, Daniel. “Perppu: Instrumen Strategik dalam Menjaga Wibawa Negara Hukum dan Menjaga Kehormatan MK”. Proposal. Disampaikan pada dialog kenegaraan. (Jakarta: DPD RI, 2013).

#### **D. PUTUSAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 perihal perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 06 Agustus 2009.

Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Perppu No. 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **E. KAMUS**

Garner, Bryan A. *Black’s Law Dictionary*. (St. Paul Minn: West Publishing, 1979).

Setiawan, Ebta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), 12 Januari 2012.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).